

Strategi Manajemen Sektor Publik Pemerintah Desa Sindangsari dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Yeni Widyastuti^{*}, Arenawati^{}, Listyaningsih^{***}**

^{*}, ^{**}, ^{***}) Program Studi Administrasi Publik FISIP Untirta

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122

E-mail: yeni.widyastuti@untirta.ac.id^{*}; arenawati@untirta.ac.id^{**};
listyaningsih@untirta.ac.id^{***})

Abstract

COVID 19 is more than just health crisis but also a humanitarian crisis in every country of the world, including creating threats in the social and economic fields. In a more diverse context, the COVID 19 pandemic has also caused disruption of social services, social activities, financial resources and economically vulnerable groups of people with low income sources who will find it difficult to access health services, difficulty meeting nutritious food needs including staple foods. Sindangsari Village as a form of public sector organization, that provision of social security and public service administration need to carry out a strategy the most effective intervention to help slow down the transmission of the COVID 19 virus at the community level. The strategy involves all agencies in village structure, RT/RW, as well as communities and local residents. These strategies are (1) Strategies for Implementing Main Duties and Government Function in Public Service; (2) Strategies for Coordination, Disseminating and Increasing Public Awareness and Health Service Preparation and (3) Strategies for Meeting the Basic Need of Community, Procedure and Mechanism during the COVID 19 pandemic.

Keywords: *strategic, management, public sector*

1. Pendahuluan

Dunia tengah menghadapi tantangan yang besar dengan semakin merebaknya pandemi virus Covid-19. Virus SARS-COV2 yang merupakan penyebab Covid-19, menyebar melalui droplet atau percikan air liur. Coronavirus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). Coronavirus adalah

zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019.

Menurut worldometers.info pukul 07.00 WIB, kasus Covid-19 di seluruh dunia hari ini per Sabtu 17 Oktober 2020 mencapai 39.562.674 kasus. Jumlah tersebut

terdiri dari 1.108.595 pasien meninggal dunia dan 29.639.974 pasien sembuh.

Indonesia menjadi salah satu negara yang telah terkonfirmasi terdapat Covid-19 di wilayahnya yang ditandai dengan banyaknya penduduk yang terinfeksi virus Covid-19. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga 17 Oktober 2020 sebanyak 357.752 orang terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, sebanyak 281.592 orang dinyatakan sembuh dan 12.431 orang dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19 ini. Ini terjadi di 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan penyebaran Covid-19 tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan dokumen *Indonesia Multi-Sectoral Response Plan to COVID 19* yang diterbitkan oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* dan *The United Nations Resident Coordinator Office (RCO)* menyebutkan bahwa pandemi COVID 19 lebih dari sekedar krisis kesehatan namun juga krisis kemanusiaan di setiap negara di dunia termasuk menciptakan ancaman-ancaman dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam konteks yang lebih beragam, pandemic COVID 19 juga menyebabkan gangguan pelayanan sosial, aktivitas sosial, sumberdaya finansial serta kelompok

masyarakat yang rentan secara ekonomi dengan sumber pendapatan rendah yang akan kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan, kesulitan memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi termasuk pangan pokok, juga kelompok yang rentan lainnya seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, juga masyarakat yang mengandalkan pendapatan dari sektor informal.

Wilayah Indonesia yang terjangkit virus Covid-19 ini sudah tersebar di 34 provinsi dengan epicentrum kasus positif Covid-19 terbanyak di 5 (lima) provinsi yaitu, pertama di wilayah DKI Jakarta (92.382 kasus); kedua adalah wilayah Jawa Timur (48.452 kasus); ketiga Jawa Barat (29.543 kasus); keempat Jawa Tengah (28.307 kasus) dan kelima Sulawesi Selatan (17.286 kasus). Salah satu wilayah di Jawa bagian Barat yang terkena dampak dan terjangkit virus Covid-19 adalah Provinsi Banten. Secara nasional Provinsi Banten berada pada urutan ke 13 (tiga belas) dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang memiliki jumlah kasus Covid-19 terbanyak yaitu 7.378 kasus (infocorona.bantenprov.go.id).

Pemerintah Daerah, sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat melakukan upaya

pengecahan dan penanggulungan COVID 19 ini. Pemerintahan tingkat Kelurahan/Desa sesuai kewenangannya diharapkan mampu untuk melakukan upaya penanggulungan COVID-19 melalui:

1. Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulungan COVID-19 kepada seluruh penduduk dengan mempergunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia di wilayah kelurahan/desa masing-masing
2. Memfasilitasi dan mendorong Para Ketua RT-RW, Kader Kesehatan, dan Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat untuk aktif melakukan berbagai upaya pencegahan penularan COVID-19
3. Mendorong kesiapan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya kebersihan personal dan kebersihan rumah sebagai bagian dari perwujudan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4. Mendorong dan mengawasi masyarakat dalam melaksanakan pembatasan kontak fisik pada berbagai sarana yang ada seperti di tempat-tempat keramaian, pasar lokal/desa, tempat ibadah, sarana olahraga, dan sarana rekreasi
5. Memanfaatkan Anggaran Dana Desa/Kelurahan untuk memberikan dukungan yang kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 baik sebagai penderita maupun akibat sosial ekonomi lainnya
6. Melaporkan kepada Pemerintah Daerah terkait hal-hal yang dipandang perlu apabila ada hal-hal yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan COVID-19.

Desa Sindangsari merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Serang. Merupakan salah satu desa yang memperoleh bantuan Pembiayaan UMi (Usaha Mikro) dan KUR dari Pemerintah Pusat yang merupakan contoh bentuk investasi berdampak sosial atau *Social Impact Investment* (SII) di Indonesia. Kegiatan ini dapat digunakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. SII merupakan suatu bentuk investasi yang memperhatikan terbentuknya dampak sosial (*social impact*) berdampingan dengan keuntungan finansial. Untuk mengoptimalkan dampak sosial tersebut, pemerintah memiliki peran mengarahkan dan membangun kolaborasi berbagai pihak baik lintas institusi. Selain Kemenkeu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga meninjau program penyediaan air bersih oleh Program Nasional Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS). Program ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Air minum dan sanitasi sangat dibutuhkan masyarakat, terutama generasi muda. Termasuk, guna menghindari kasus stunting yang kerap menjadi dampak konsumsi air tidak bersih dan sanitasi kotor.

Gambaran tentang Desa Sindangsari di atas menunjukkan bahwa telah banyak dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terkait pemberian bantuan modal usaha mikro serta peningkatan upaya kesehatan masyarakat melalui bantuan air bersih oleh Kementerian PUPR. Dalam situasi pandemic COVID-19 ini maka perlu diketahui bagaimana strategi pemerintah desa untuk mengupayakan stabilitas ekonomi mengingat sebagian masyarakat memiliki usaha mikro serta kesadaran kesehatan masyarakat dengan tersedianya bantuan air bersih dan yang terutama adalah bagaimana pemerintah desa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Desa merupakan sebuah bentuk organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang menggunakan dana masyarakat (Indra Bastian, 2016: 5) dengan contoh-contoh aktivitas sektor publik yaitu pemberian jaminan sosial, administrasi, perencanaan wilayah juga pengorganisasian pertanahan nasional. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul Strategi Manajemen Sektor Publik Pemerintah Desa Sindang Sari Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

2. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen sektor publik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kabupaten Serang terutama dalam pemberian jaminan sosial kebutuhan dasar masyarakat serta standar pelayanan minimal selama masa pandemic COVID 19. Implementasi strategi yang dilakukan dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Serang khususnya serta kebijakan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Dengan mempertimbangkan tujuan dalam penelitian tersebut di atas maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Desa Sindangsari, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan para Ketua RT/RW di wilayah Desa Sindangsari dan warga masyarakat. Proses analisis dan interpretasi data menggunakan teori Creswell (2018:263) dan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

3. Hasil

Letak Desa Sindangsari sangat strategis karena tidak jauh dari pusat pemerintahan.

Jarak Desa Sindangsari dari Pusat Pemerintahan atau Orbitasi adalah (a) Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 6 Km; (b) Jarak dari pusat pemerintahan Kota Administratif : 2 Km; (c) Jarak dari Ibukota Kabupaten Serang : 7 Km; (d) Jarak dari Ibukota Propinsi Banten : 3 Km dan (e) Jarak dari Ibukota Negara : 111 Km. Jumlah penduduk Desa Sindangsari pada tahun 2019 adalah sebanyak 13.537 jiwa, yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.337 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 7.201 jiwa (Sumber: Profil Desa Sindangsari, 2019).

Dalam hal pekerjaan sebagian besar penduduk Desa Sindangsari adalah pedagang dan wirastawan, selanjutnya buruh tani sebanyak 951 orang, Petani 823 orang. Tukang kayu, Batu dan Kuli Bangunan sebanyak 659 orang, karyawan/ABRI dan PNS sebanyak 79 orang dan juga terdapat 15 orang pemulung. Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa 49 % atau sebanyak 2.367 orang adalah penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Sebanyak 39% atau 1.850 orang adalah penduduk usia sekolah 13-15 tahun, dan sebanyak 12% atau 589 orang adalah penduduk usia sekolah 4-6 tahun. Jika dihubungkan dengan penyebaran virus corona maka resiko terjadinya penyebaran virus corona adalah di

lingkungan sekolah dasar. Oleh karena itu kebijakan dihilangkannya sementara pembelajaran tatap muka merupakan salah satu upaya pencegahan tersebarnya virus COVID 19.

4. Pembahasan

a. Strategi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Masa Pandemi COVID 19

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah maka setiap Bupati/Walikota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID 19 tingkat kecamatan dan kelurahan serta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penanganan COVID 19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kearifan lokal daerah.

Struktur Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta Desa, Dusun/RWRT sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 1 (satu) bendahara, 1 (satu) Sekretaris dan 4 seksi, yaitu: komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum dan pendisiplinan.

Di Desa Sindangsari, sejauh ini belum terjadi kasus positif COVID 19, namun berkaitan dengan mekanisme komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat telah dilakukan semua pihak, mulai dari tingkat desa atau Kepala Desa dan jajarannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai Ketua RT/RW dan segenap lapisan masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan publik juga masih sebagaimana biasa namun tetap menjalankan protokol Kesehatan. Apalagi Desa Sindangsari juga memiliki kawasan Desa Tangguh yang focus dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Serang.

b. Strategi Koordinasi, Diseminasi dan Peningkatan Kewaspadaan Umum serta Penyiapan Layanan Kesehatan

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan agar semua pekerjaan dalam organisasi terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Koordinasi dilakukan dengan berbagai bentuk dan sarana, seperti melalui rapat, diskusi pada grup di media sosial dan lain-lain. Bagaimana koordinasi dalam penanganan tingkat provinsi sampai dengan desa dapat kita lihat bagaimana struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Daerah sebagaimana yang

tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Daerah.

Dalam penanganan Covid 19 Satuan Tugas Covid terbagi dalam 6 Bidang Kegiatan.

1. Bidang Data dan Informasi
2. Bidang Komunikasi Publik
3. Bidang Perubahan Perilaku
4. Bidang Penanganan Kesehatan
5. Bidang Penegakkan Hukum dan Disiplin.
6. Bidang Relawan.

Dalam pelaksanaannya ke enam bidang ini harus berkoordinasi satu dengan yang lain. Bidang Data dan Informasi, berfungsi sebagai pengolah data dimana akan berkoordinasi dengan bidang penanganan kesehatan untuk mengetahui jumlah pasien, penyebaran covid dan berkoordinasi dengan bagian komunikasi publik untuk menyebarkan semua informasi tentang COVID 19.

Dalam Penanganan Wabah Covid 19 di Kabupaten Serang, telah diterbitkan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa dalam penanganan Covid 19 harus memperhatikan 4 M. M pertama *Memakai Masker*, M kedua *Mencuci Tangan*, M ketiga *Menjaga Jarak* dan M yang terakhir adalah *Menghindari*

Kerumunan. Kebijakan ini tentunya menjadi dasar pelaksanaan protocol kesehatan di Kabupaten Serang, begitu juga desa.

Pemerintah Desa Sindangsari selalu berkoordinasi dengan pihak Puskesmas setempat dalam rangka sosialisasi 4 M. Koordinasi dari pihak Puskesmas biasanya dilakukan dengan mengundang kader posyandu untuk menghadiri sosialisasi yang dilakukan, pihak puskesmas sebagai kaki tangan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Setelah itu kader posyandu dan bidan desa mempunyai tugas untuk menyampaikan hasil sosialisasi tersebut pada masyarakat.

Selain berkoordinasi dengan pihak puskesmas dan dinas kesehatan pemerintah desa Sindangsari juga menjalin koordinasi ke bawah, yaitu berkoordinasi dengan setiap kepala kampung, ketua RT dan RW dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan menyebarnya COVID 19 ini di wilayah Desa Sindangsari.

c. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Alur dan Mekanismenya

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindagsari untuk mecegah masuknya virus corona di Desa Sindangsasri telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- (i) Desa Siaga Aktif dan Kampung Tangguh dimana salah satu Kawasan di Desa Sindangsari sudah menjadi Kawasan Desa atau Kampung Tangguh.
- (ii) Kerja Bakti Keliling.: Direncanakan, kerja bakti keliling tersebut akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sekali secara bergiliran di seluruh kampung yang sedang gotong-royong di wilayahnya masing-masing.
- (iii) Pemberian Bantuan: Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang mencairkan kepada warga masyarakat terdampak covid-19, penyaluran dana BLT-DD sebesar Rp.600.000- per KK. Sejauh ini pemberian bantuan berjalan dengan baik dan tidak ada konflik dalam masyarakat terkait keadilan atau salah sasaran.
- (iv) Menerapkan dan Mengawasi Protokol Kesehatan. Salah satunya adalah jika ada warga yang pulang bekerja dari luar daerah terutama dari DKI Jakarta maka yang bersangkutan akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Pemerintah Desa Sindangsari juga telah menyiapkan rumah khusus untuk melakukan karantina bagi warga

masyarakat yang masuk ke Desa Sindangsari dari wilayah-wilayah zona merah COVID 19, meskipun sampai saat ini rumah tersebut belum ada yang menempati karena memang belum ada warga desa yang positif COVID 19.

5. Simpulan

a. Simpulan

Penelitian Strategi Manajemen Sektor Publik Pemerintah Desa Sindangsari dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan melalui 3 (tiga) strategi yaitu:

(i) Strategi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara lain melalui pembentukan satuan tugas penanganan COVID 19 tingkat desa dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah desa yang terdiri dari Bidang Data dan Informasi; Bidang Komunikasi Publik; Bidang Perubahan Perilaku; Bidang Penanganan Kesehatan; Bidang Penegakkan Hukum dan Disiplin dan Bidang Relawan. Terkait pelayanan publik tetap dilakukan sebagaimana mestinya di Kantor Desa Sindangsari namun dengan penggunaan protokol Kesehatan. Hal ini karena di Desa Sindangsari belum ada positif kasus COVID 19

(ii) Strategi Koordinasi, Diseminasi dan Peningkatan Kewaspadaan Umum serta Penyiapan Layanan Kesehatan

Di Desa Sindangsari sudah ada Desa Siaga dan Kampung atau Desa Tangguh yang salah indikatornya adalah penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Ditambah dengan kegiatan kerjabakti keliling yang akan rutin dilakukan pihak desa serta sosialisasi protocol Kesehatan dengan melibatkan bidan atau pihak puskesmas serta para relawan.

(iii) Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Alur dan Mekanismenya
Pemerintah Desa Sindangsari menyiapkan Bansod DD senilai 600 ribu/KK selain Bansos dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Serang. Tidak terjadi konflik dalam penyapaian dan penyaluran bantuan untuk COVID 19.

b. Rekomendasi

Dalam penelitian ini disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

(i) Dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat dimaksimalkan fungsi website desa sindangsari.net sehingga mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik lebih mengindari tatap muka secara langsung

(ii) Kolaborasi dalam penyelenggaraan Desa Tangguh dan Desa Siaga Aktif sehingga pemberdayaan masyarakat akan semakin kuat. Dengan lokasi wilayah yang dekat dengan Kampus Untirta maka relasi dan kolaborasi dengan Untirta salah satunya, dapat terus ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Aprinto, Brian & Fanny Arisandi Jacob. 2013. Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia. Jakarta: Penerbit PPM
- Bastian, Indra. 2016. Strategi Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Creswell, John W. 2018. Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frank Fischer.,Gerald J.Miller.,Mara S.Sidney. 2019. Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode (Terjemahan: *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods*). Bandung: Nusa Media
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gava Media
- Michael Moran.,Martin Rein.,Robert E.Goodin. 2016. Handbook Kebijakan Publik (Terjemahan: *Handbook of Public Policy*). Bandung: Nusa Media.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Neuman, W Lawrence, 2019. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif
- Sri Suwitri., Hartuti Purnaweni.,Kismartini. 2016 Analisis Kebijakan Publik (Buku Materi Pokok MAP5301/4 sks/Modul 1-12). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Subarsono, AG.2015. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi (Cetakan Ke-7). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS

Artikel Jurnal:

- Nur Rohim Yunus, & Annissa Rezki. 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.

7 No. 3 (2020), pp.227-238 DOI:
10.15408/sjsbs v7i3.15083

Nur Sholikhah Putri Suni 2020. Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XII, No.3/I/Puslit/Februari/2020. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RIGd. Nusantara I Lt. 2. Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat - 10270c 5715409 d 5715245

Aturan Perundang-undangan:

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)

PP No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Surat Edaran Mendagri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Daerah

Dokumen:

COVID 19 *Strategy Update* tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh *World Health Organization (WHO)*

Indonesia Multi Sectoral Response Plan to COVID 19. *Produced by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and The United Nations Resident Coordinator Office (RCO) in*

collaboration with humanitarian and development partners in Indonesia

Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID 19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2020. Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia. www.covid19.go.id

Website:

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--efektivitas-social-distance-dalam-penanganan-wabah-virus-corona>

diakses 29 April 2020 jam 11.18

infocorona.bantenprov.go.id

worldometers.info

sindangsari.net